



DINAS SOSIAL
PROVINSI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

UKJIP

Tahun

2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (LKjIP Dinsos) Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).

Seiring dengan upaya merealisasikan perwujudan pemerintahan yang baik Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah yang secara sistematis telah dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026, Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu : **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**. Visi ini mengandung arti untuk mewujudkan masyarakat Sulteng yang Maju, Damai, Sejahtera dan mandiri menuju melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. untuk melakukan pengembangan kapasitas masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam pembangunan. Kemandirian merupakan tujuan akhir penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana kondisi PMKS terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Pembangunan kesejahteraan sosial , Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah mengevaluasi, menganalisa dan menetapkan beberapa strategi dalam implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 antara lain dengan mengutamakan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan serta pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja secara periodik sehingga konsisten dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

Hasil laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan mencapai target sasaran yang telah ditetapkan sehingga pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan capaian kinerja Pembangunan kesejahteraan sosial sangat baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022.

Palu, Januari 2023
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199103 2 006

DAFTAR ISI

1. HALAMAN JUDUL
2. RINGKASAN EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	CASCADING KINERJA	1
1.2	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
1.3	ISU – ISU STRATEGIS	9
1.4	DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA	38
1.5	TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP	47
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	48
2.1	TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	49
2.2	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
2.3	STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	51
2.4	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	56
2.5	PERJANJIAN KINERJA TAHUN	57
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1	CAPAIAN KINERJA	59
3.1.1	PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021	59
3.1.2	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016-2021	62
3.1.3	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DAN TARGET RPJMD 2016-2021	66

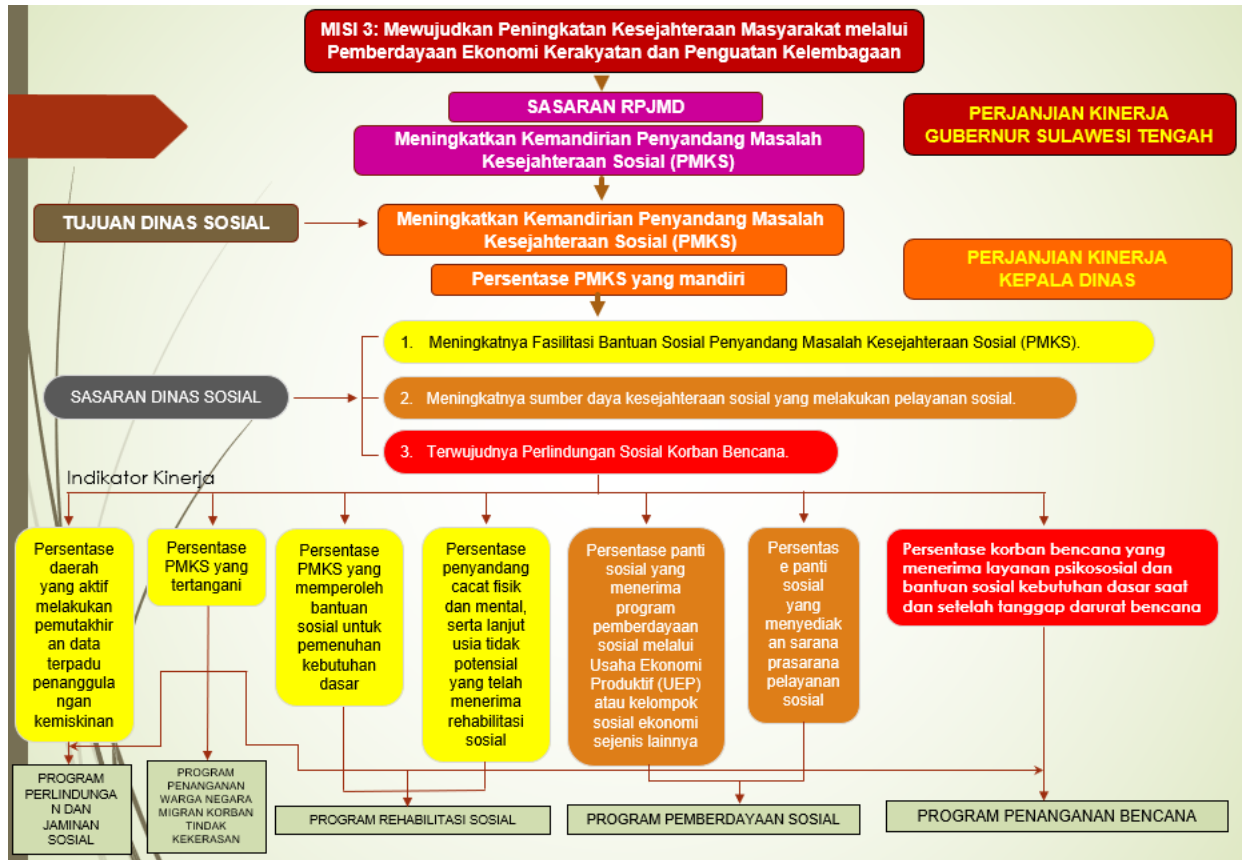
3.1.4	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	68
3.1.5	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	69
3.2	EFESIENSI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN.....	77
BAB IV	PENUTUP.....	92

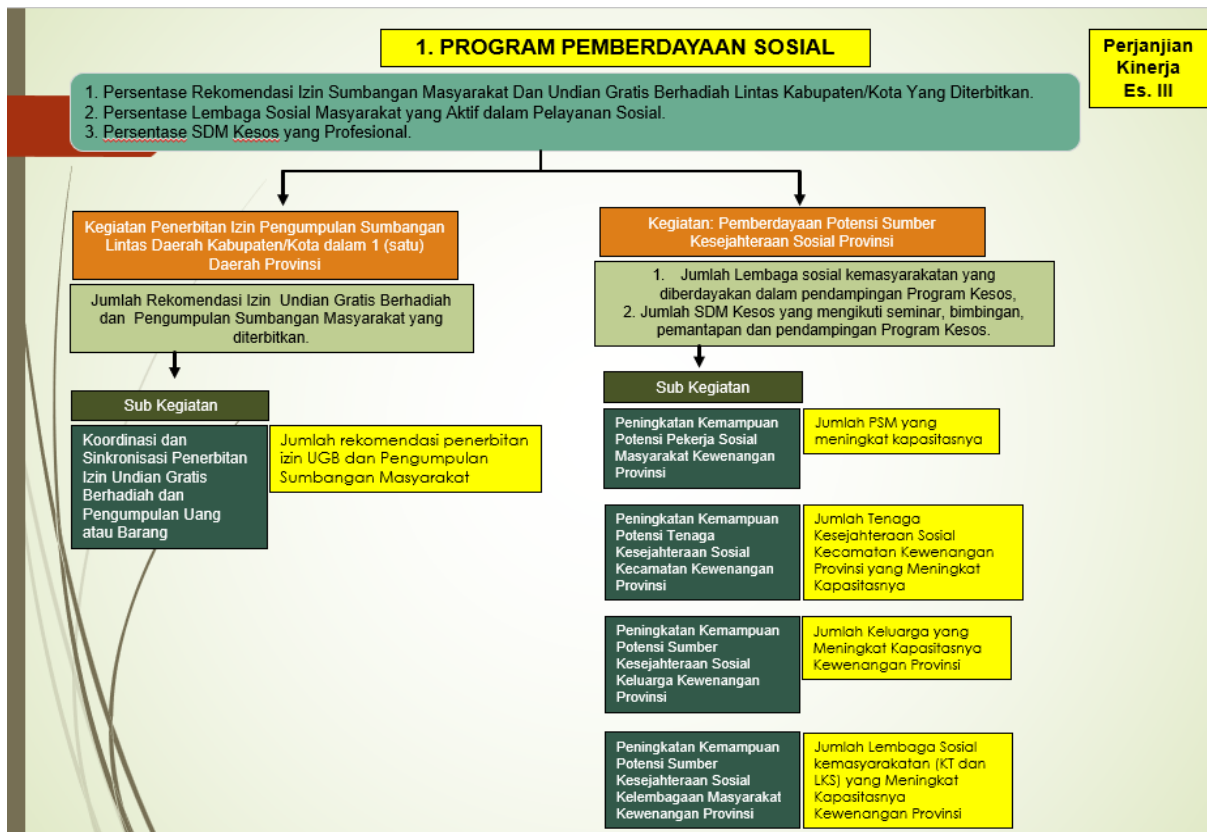
BAB I PENDAHULUAN

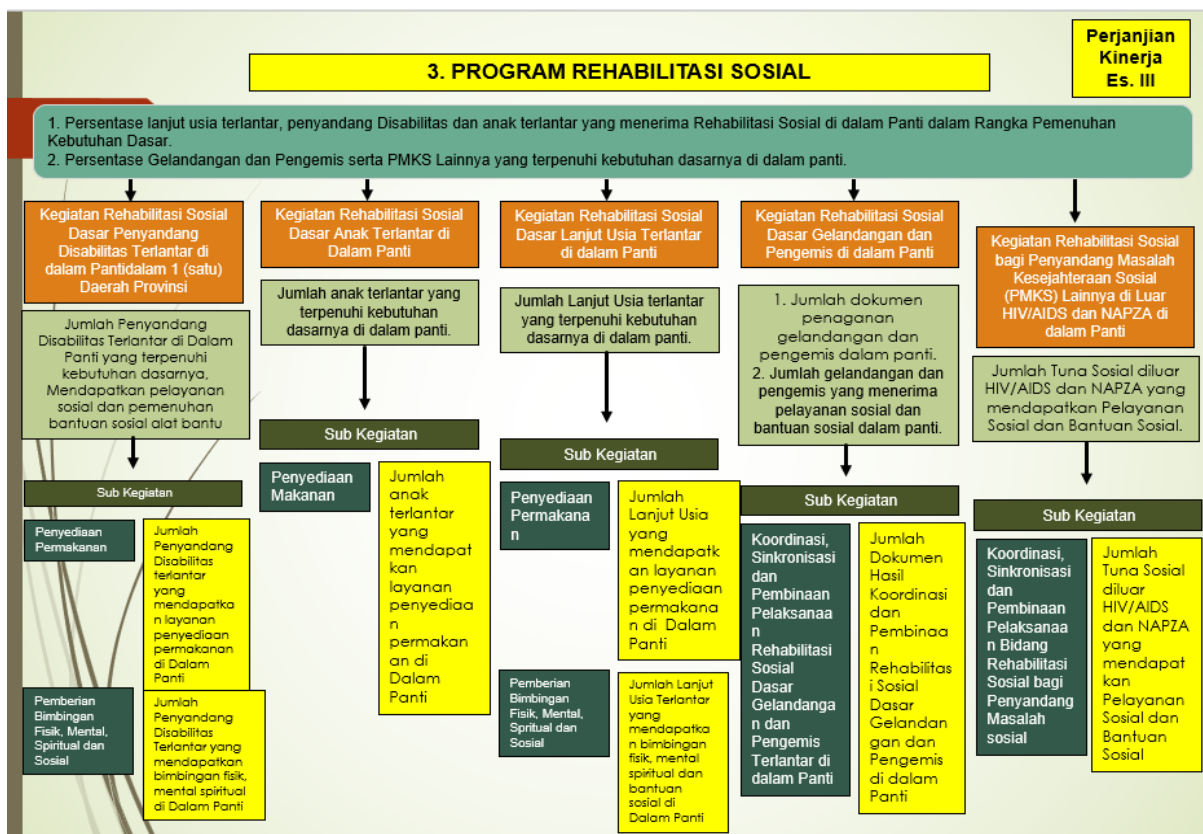
1.1 CASCADING KINERJA

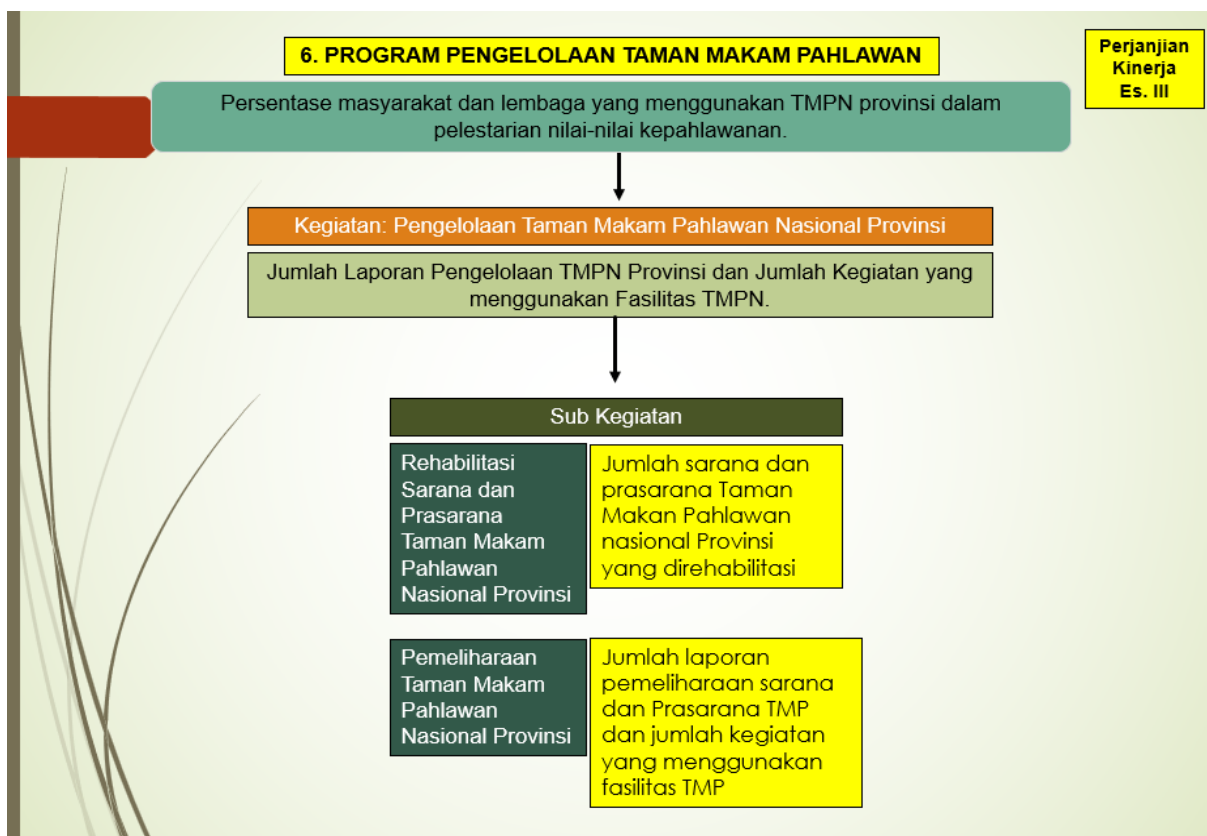
Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. diuraikan dalam *cascading* Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Adapun Cascading Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :









1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Gubernur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Subbagian Keuangan dan Asset
 - c. Perencana Ahli Muda
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda
 - c. Penyuluh Sosial Ahli Muda
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda
 - c. Penyuluh Sosial Ahli Muda
5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda

- c. Penyuluh Sosial Ahli Muda
- 6. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda
 - b. Penyuluh Sosial Ahli Muda
 - c. Penyuluh Sosial Ahli Muda
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dibantu juga oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut :

- 1. UPTD Panti Sosial Anak yang terletak di Kota Palu.
- 2. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang terletak di Kota Palu.
- 3. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Madago” yang terletak di Kabupaten Poso.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berjumlah 160 Orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat / Golongan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	Perangkat Daerah OPD	Pangkat / Golongan																Jumlah
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	
1	2	3																4
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	-	1	4	12	22	11	12	15	4	5	22	3	-	-	-	-	111
2	UPT Panti Sosial Anak	-	-	-	1	6	3	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	16
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	-	1	2	1	1	3	-	-	5	2	-	-	-	-	15
4	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	-	1	1	4	-	2	5	4	1	-	-	-	-	-	18
Total																		160

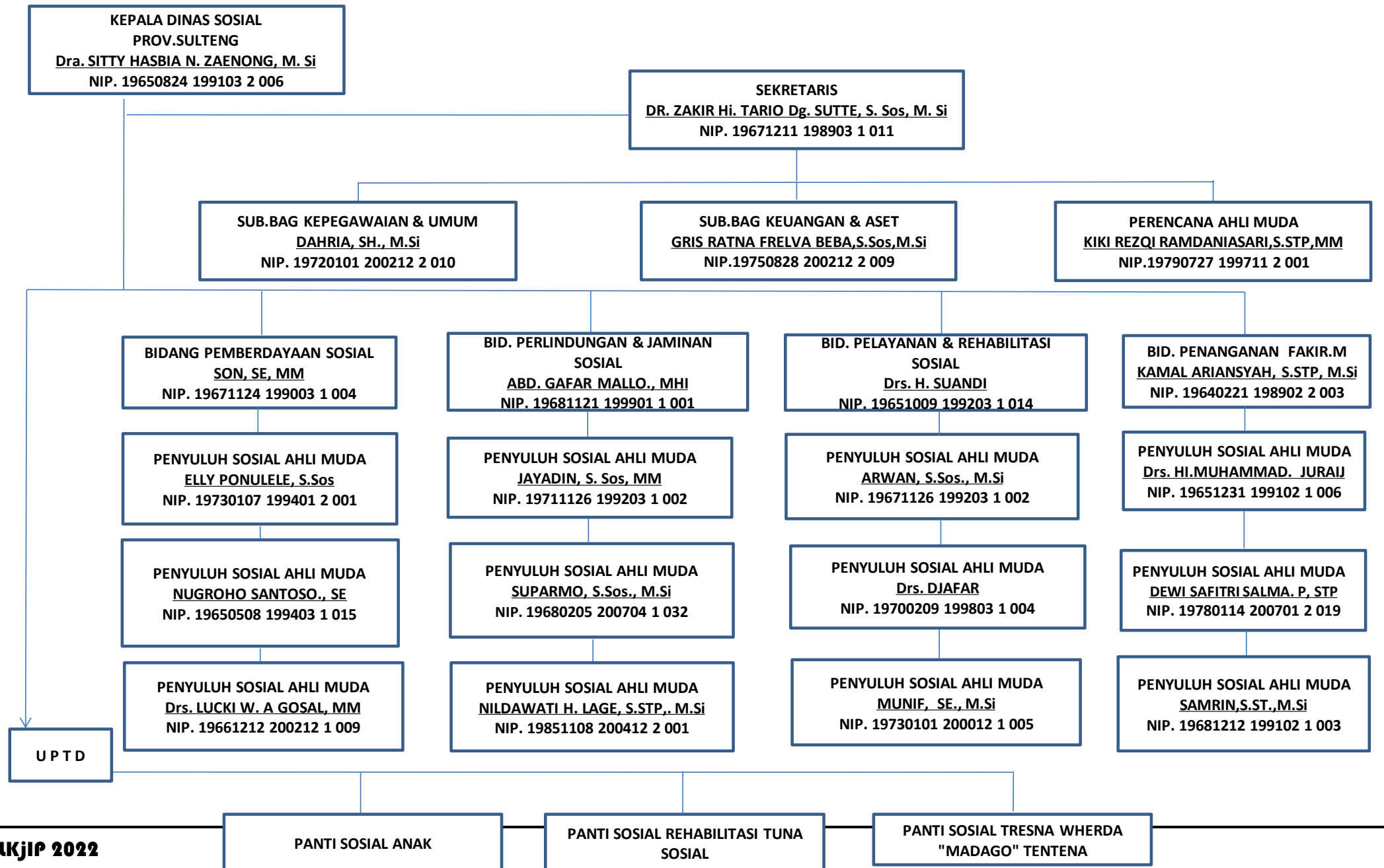
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Tabel 1.2
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	Perangkat Daerah OPD	Kualifikasi Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	DI	SMA/SLTA	SMP/SLTP	SD	
1	2	3										4
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	2	16	49	2	3	-	-	39	-		111
2	UPT Panti Sosial Anak	-	2	9	1	-	-	-	4	-		16
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	1	5	-	-	-	-	9	-		15
4	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	6	-	-	-	-	12	-		18
Total												160

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROV. SULTENG



1.3 ISU – ISU STRATEGIS

Kondisi saat ini, Provinsi Sulawesi Tengah masih terus dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks baik secara kualitas maupun kuantitasnya meliputi :

a). Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Oleh karena itu, masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar.

Kemiskinan juga merupakan salah satu dampak negatif pembangunan yang kasat mata dimana penanganan serta pengentasannya telah menjadi program prioritas baik pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendasari Pemerintah untuk mempunyai database penduduk miskin melalui Program Pendataan Perlindungan Sosial atau yang dikenal dengan PPLS pada tahun 2011 sehingga intervensi program kegiatan pengentasan lebih tepat isi dan tepat sasaran. Adapun, indikator yang digunakan adalah pengeluaran perkapita seseorang selama sebulan terhadap kesanggupan untuk memenuhi standar hidup minimal. Diawali tahun 2015, Kementerian Sosial secara giat menginstruksikan seluruh Instansi Sosial Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi terhadap data fakir miskin dan orang tidak mampu serta melaporkan secara online melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) untuk ditetapkan oleh Menteri Sosial. Penetapan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang terakomodir dalam Basis Data Terpadu sesuai Kepmensos No. 146/HUK/2022 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	DTKS 2022
		KEPMENSOS RI NO.146/HUK/2022 Tanggal 21 Maret 2022
		JUMLAH JIWA
1	KAB. BANGGAI	182.496
2	KAB. POSO	188.493
3	KAB. DONGGALA	178.046
4	KAB. TOLI TOLI	132.096
5	KAB. BUOL	124.219
6	KAB. MOROWALI	85.535
7	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	69.765
8	KAB. PARIGI MOUTONG	274.036
9	KAB. TOJO UNA UNA	106.618
10	KAB. SIGI	156.027
11	KAB. BANGGAI LAUT	40.230
12	KAB. MOROWALI UTARA	62.569
13	KOTA PALU	157.425
JUMLAH TOTAL (JIWA)		1.757.555

Sumber :DTKS 2022 (Kepmensos Nomor 146/HUK/2022)

b). Kecacatan

Kecacatan diartikan sebagai terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktural anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi kekeluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran dan keterasingan. Kecacatan yang sedang marak dan meningkat populasinya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mengalami pemasungan. Kondisi ketidaktahuan masyarakat mengenai hak ODGJ di pasung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang –undang menjadi perhatian serius pemerintah sehingga disusun langkah langkah yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) sebagai bentuk preventif dan penanganan. Adapun data penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Kode	RAGAM DISABILITAS	KABUPATEN BUOL	KABUPATEN PARIMO	KABUPATEN TOUNA	KABUPATEN SIGI	KABUPATEN BALUT	KABUPATEN MORUT	KOTA PALU	KABUPATEN BANGKEP	KABUPATEN BANGGAI	KABUPATEN MOROWALI	KABUPATEN POSO	KABUPATEN DONGGALA	KABUPATEN TOLI TOLI	JUMLAH
1	Tuna daksa/ cacat tubuh	259	565	254	325	89	172	284	231	524	128	487	398	302	4018
2	Tuna netra/buta	204	372	138	215	47	100	113	201	428	105	202	284	187	2596
3	Tuna rungu	144	198	73	165	44	64	35	136	258	41	176	141	120	1595
4	Tuna wicara	76	236	64	149	27	54	76	93	159	51	173	133	100	1391
5	Tuna rungu & wicara	40	92	33	70	11	35	33	38	69	17	94	63	46	641
6	Tuna netra & cacat tubuh	45	64	19	49	3	27	13	37	66	22	45	60	37	487
7	Tuna netra, rungu, & wicara	17	26	7	27	-	9	10	4	22	9	18	16	10	175
8	Tuna rungu, wicara, & cacat tubuh	23	39	18	37	3	18	20	16	41	7	38	30	25	315
9	Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh	18	57	12	22	3	11	15	14	36	11	23	41	12	275
10	Cacat mental retardasi	114	270	102	136	49	97	125	129	243	84	236	197	112	1894
11	Mantan penderita gangguan jiwa	53	126	48	87	10	37	51	38	105	25	83	139	40	842
12	Cacat fisik & mental	224	279	111	193	29	110	95	136	263	83	206	190	144	2063
JUMLAH DISABILITAS		1217	2324	879	1475	315	734	870	1073	2214	583	1781	1692	1135	16.292,00

Sumber : DTKS 2020 (Kepmensos Nomor 146/HUK/2020)

Tabel 1.5
Data Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ODGJ (JIWA)
1	2	3
1.	BANGGAI	611
2.	BANGGAI KEPULAUAN	303
3.	BANGGAI LAUT	88
4.	BUOL	391
5.	DONGGALA	526
6.	KOTA PALU	271
7.	MOROWALI	192
8.	MOROWALI UTARA	244
9.	PARIGI MOUTONG	675
10.	POSO	525
11.	SIGI	416
12.	TOJO UNA-UNA	261
13.	TOLI-TOLI	296
TOTAL		4.799

c). Keterlantaran

Keterlantaran yang dimaksud adalah penelantaran terhadap anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing di era globalisasi. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Begitupun dengan lanjut usia, era globalisasi telah melunturkan budaya timur yang begitu menghormati orang tua dan orang yang lebih tua sehingga

kondisi sekarang, banyak anak tidak mempedulikan orang tua dan menganggap orang tua sebagai tambahan beban hidup yang semakin meningkat. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan lanjut usia.

Di Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun atau kategori anak (sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020) sebanyak 1.121.193 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin untuk penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun sebanyak 420.620 Jiwa (sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020). Sedangkan jumlah penduduk usia di atas 60 tahun sebanyak 249.592 Jiwa (sumber : Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020) sedangkan jumlah penduduk lanjut usia miskin adalah 118.140 Jiwa (sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020). Kemiskinan merupakan salah satu sebab utama anak mengalami penelantaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 37,51 % dari jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun yang ada di Sulawesi Tengah berpotensi mengalami penelantaran. Sedangkan lanjut usia sebanyak 47,33 % yang berpotensi mengalami penelantaran.

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, bahwa jenis PMKS terkait anak terdiri dari Anak balita, Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak jalanan, Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun data anak terlantar pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.6

Data Anak Terlantar Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	ANAK TERLANTAR (Jiwa)
1	2	3
1	KAB. BANGGAI	40.995
2	KAB. POSO	43.128

NO.	KABUPATEN/KOTA	ANAK TERLANTAR (Jiwa)
1	2	3
3	KAB. DONGGALA	48.270
4	KAB. TOLI-TOLI	34.521
5	KAB. BUOL	33.621
6	KAB. MOROWALI	18.885
7	KAB. BANGKEP	17.387
8	KAB. PARIMO	67.657
9	KAB. TOUNA	27.228
10	KAB. SIGI	38.486
11	KAB. BALUT	9.621
12	KAB. MORUT	14.509
13	KOTA PALU	37.574
JUMLAH TOTAL		431.882

Sumber : DTKS 2022 (Kepmensos Nomor 146/HUK/2022)

Sedangkan Jumlah Lanjut Usia Terlantar sebagai berikut :

Tabel 1.7

Data Lanjut Usia Terlantar Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	LANJUT USIA TERLANTAR (Jiwa)
1	2	3
1	KAB. BANGGAI	22.833
2	KAB. POSO	22.241
3	KAB. DONGGALA	14.730
4	KAB. TOLI-TOLI	10.998
5	KAB. BUOL	9.382
6	KAB. MOROWALI	7.570
7	KAB. BANGKEP	7.617
8	KAB. PARIMO	23.736
9	KAB. TOUNA	9.706
10	KAB. SIGI	13.524
11	KAB. BALUT	3.375

12	KAB. MORUT	6.810
13	KOTA PALU	15.871
JUMLAH TOTAL		168.393

Sumber : DTKS 2022 (Kepmensos Nomor 146/HUK/2022)

d). Ketunaan Sosial dan penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan handal. Masalah ketunaan sosial yang ada di Sulawesi Tengah yang merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis yang mulai bermunculan, kelompok minoritas, tuna susila, eks narapidana atau bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dan penderita HIV/AIDS.

Selain disebabkan masalah kemiskinan, ketunaan sosial juga merupakan akibat dari ketidakmampuan kelompok tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga keberfungsian sosial mereka terganggu.

e). Keterpencilan/Ketertinggalan

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan baik dari segi geografis maupun sosial budaya yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 16.472 KK Komunitas Adat Terpencil tersebar di 192 lokasi, 65 kecamatan, 11 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi calon lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun 2015-2019. Penambahan kuantitas baik jumlah Kepala Keluarga, jumlah lokasi, kecamatan dan jumlah kabupaten

merupakan dampak dinamika pemekaran wilayah dan pertumbuhan penduduk. Dari 11 kabupaten yang ada, kabupaten Sigi dan Kabupaten Tolitoli merupakan wilayah terbanyak lokasi Komunitas Adat Terpencil yaitu Kabupaten Sigi terdiri dari 12 kecamatan 38 lokasi dan Kabupaten Tolitoli terdiri dari 10 kecamatan dan 46 lokasi. Sedangkan Kabupaten yang tidak termasuk dalam wilayah Komunitas Adat Terpencil adalah Kota Palu dan Kabupaten Buol. Adapun data Komunitas Adat Terpencil diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.9
Data Komunitas Adat Terpencil Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (KK)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3	4
1.	BANGGAI	1.117	5.858
2.	BANGGAI KEPULAUAN	231	1.155
3.	BANGGAI LAUT	972	4.860
4.	BUOL	-	-
5.	DONGGALA	1.159	5.795
6.	KOTA PALU	-	-
7.	MOROWALI	392	1.960
8.	MOROWALI UTARA	1.032	5.160
9.	PARIGI MOUTONG	2.377	11.885
10.	POSO	94	470
11.	SIGI	3.127	14.790
12.	TOJO UNA-UNA	1.157	5.785
13.	TOLI-TOLI	4.814	22.075
TOTAL		16.472	79.793

Sumber : Sebaran Data KAT Kementerian Sosial

f). Akibat Bencana Alam

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota. Sulawesi Tengah mempunyai kondisi geografis yang luas dimana hampir setiap kabupaten mempunyai daerah administratif yang berada di pulau

bahkan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai laut merupakan daerah otonom yang terdiri dari pulau-pulau. Kondisi dimaksud ditambah terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadikan kendala pada saat penanganan kejadian bencana. Secara akumulatif, bencana alam yang timbul menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil setiap tahunnya.

Pada bencana alam, Dinas Sosial bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana tugas dan fungsi Dinas Sosial lebih kepada sosialisasi dan pemetaan daerah rawan bencana pada pra bencana sehingga dapat meminimalisir dan mengantisipasi kejadian bencana, ikut serta pada saat bencana berupa penyediaan bantuan logistik dan personil yaitu Taruna Siaga Bencana serta bantuan psikososial berupa pendampingan kepada korban bencana pada pasca bencana. Di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 terjadi bencana alam skala besar di beberapa kabupaten/ kota yang terdampak. Adapun rincian data korban jiwa bencana alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.10
Data Bencana Alam Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

N O	KABUPATEN/KO TA	JENIS KEJADIAN	JUMLAH KORBAN TERDAMPAK		JUMLAH PENGUNGSI		JUMLAH KERUSAKAN RUMAH TINGGAL		
			KK	JIWA	KK	JIWA	Rusak Total	Rusak Berat	Rusak Ringan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTA PALU	Banjir	1866	6962	6	28	0	6	374
		Angin Puting Beliung	7	30	7	30	0	7	0
2	KAB. SIGI	Angin Puting Beliung	7	28	2	0	0	2	5
		Banjir Bandang	270	1068	88	370	2	12	76
3	KAB. DONGGALA	Banjir Bandang	56	222	5	15	2	3	1
		Banjir	165	498	0	0	6	3	10
4	KAB. PARIGI MOUTONG	Banjir Bandang	566	2266	331	1324	8	15	162
		Banjir	0	0	155	610	0	0	155
5	KAB. TOLI-TOLI	Banjir Bandang	1419	4775	115	356	18	82	70
		Banjir	618	2184	3	15	0	5	0

6	KAB. BUOL	-	0	0	0	0	0	0	0
7	KAB. TOJO UNA-UNA	Banjir	417	1115	30	120	0	0	0
8	KAB. BANGGAI	Banjir Bandang	506	1826	100	300	7	29	16
		Banjir	275	610	7	0	0	7	247
9	KAB. BANGGAI LAUT	-	0	0	0	0	0	0	0
10	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	-	0	0	0	0	0	0	0
11	KAB. MOROWALI UTARA	Banjir	110	440	0	0	0	0	0
12	KAB. MOROWALI	Banjir Bandang	360	1009	360	1009	0	0	0
13	KAB. POSO	Angin Puting Beliung	15	75	6	30	0	6	9
TOTAL KEJADIAN KAB/KOTA		Angin Puting Beliung	29	133	15	60	0	15	14
		Banjir Bandang	3177	11166	999	3374	37	141	325
		Banjir	3451	11809	201	773	6	21	786

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

Bencana alam yang terjadi mengakibatkan banyaknya korban jiwa baik yang mengalami luka ringan maupun berat bahkan sampai kematian. Dalam hal ini bencana alam tersebut merupakan kondisi yang tidak dapat diprediksi sehingga program dan kegiatan pra bencana harus lebih digalakkan sebagai upaya preventif meminimalisir peningkatan jumlah korban bencana.

g). Akibat Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (*man made disasters*) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan sekelompok masyarakat.

Guna menghindari dampak negatif yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi, maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh. Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup

berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkan.

Berbagai konflik dan kerusuhan sosial beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat, terutama yang perlu diwaspadai adalah ancaman konflik horisontal seperti perkelahian antar desa serta ancaman konflik yang disebabkan terorisme. Daerah yang berpotensi besar terhadap konflik horisontal sesuai kajian pemetaan adalah Kabupaten Poso, Buol, Sigi dan Kota Palu. Hal ini merupakan ancaman serius bagi Provinsi Sulawesi Tengah dan secara umum keutuhan bangsa. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Adapun rincian data korban jiwa bencana sosial pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.11
Data Kejadian Bencana Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

KABUPATEN / KOTA	NO	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH KORBAN (KK)	JENIS KERUSAKAN	LOKASI BENCANA		KERUGIAN AKIBAT BENCANA			JUMLAH KORBAN (JIWA)
						DESA / KEL.	KECAMATAN	RUSAK TOTAL	RUSAK BERAT	RUSAK RINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOTA PALU	1	Kebakaran	04-Jan-22	8	8 Petak Tempatat Usaha yang ditempati	Balaroa	Palu Barat	√			30
	2	Kebakaran	04-Jan-22	3	1 Rumah	Birobuli Utara	Palu Selatan	√		√	11

KABUPATEN / KOTA	NO	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH KORBAN (KK)	JENIS KERUSAKAN	LOKASI BENCANA		KERUGIAN AKIBAT BENCANA			JUMLAH KORBAN (JAWA)
						DESA / KEL.	KECAMATAN	RUSAK TOTAL	RUSAK BEBAST	RUSAK RINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Kebakaran	08-Jan-22	1	1 Kamar Tidur	Mamboro Barat	Palu Utara				4
	4	Kebakaran	20-Jan-22	3	1 Rumah + 2 Tempat Usaha	Tavanjuka	Tatang a	√			10
	5	Kebakaran	27-Jan-22	2	2 Rumah + 2 Tempat Usaha	Talise Valangguni	Mantik ulore	√			10
	6	Kebakaran	30-Jan-22	1	1 Rumah	Lere	Palu Barat	√			2
	7	Kebakaran	11-Feb-22	1	1 Kamar Tidur + Ruang Atas	Tanamodi ndi	Mantik ulore			√	5
	8	Kebakaran	27-Feb-22	3	1 Rumah + 1 Unit Mobil + 5 Unit Motor	Besusu Timur	Palu Timur	√			9
	9	Kebakaran	04-Mar-22	1	1 Unit Kost	Tondo	Mantik ulore		√		1
	10	Kebakaran	10-Apr-22	2	2 Petak Tempat Usaha	Petobo	Palu Selatan	√			10
	11	Kebakaran	23-Apr-22	1	1 Rumah Bagia	Tanamodi ndi	Mantik ulore			√	3

KABUPATEN / KOTA	NO	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH KORBAN (KK)	JENIS KERUSAKAN	LOKASI BENCANA		KERUGIAN AKIBAT BENCANA			JUMLAH KORBAN (JAWA)
						DESA / KEL.	KECAMATAN	RUSAK TOTAL	RUSAK BEKAT	RUSAK RINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					n Dapur						
	12	Kebakaran	23-Apr-22	3	5 Rumah + 1 Mobil Tangki Gas + 2 Mobil Pribadi	Balaroa	Palu Barat	√			15
	13	Kebakaran	01-Mei-22	1	1 Unit Rumah Bagian Samping Luar	Tipo	Ulujadi			√	4
	14	Kebakaran	07-Mei-22	1	1 Unit Rumah Bagian dapur	Birobuli Utara	Palu Selatan			√	5
	15	Kebakaran	12-Mei-22	1	1 Unit Rumah Bagian Dapur + Kamar	Tavanjuka	Tatang a			√	3
	16	Kebakaran	30-Mei-22	1	1 Unit Tempat Usaha yang di Tempati	Besusu Timur	Palu Timur		√		3
	17	Kebakaran	31-Mei-22	1	1 Unit Rumah Bagian	Donggala Kodi	Ulujadi		√		3

KABUPATEN / KOTA	NO	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH KORBAN (KK)	JENIS KERUSAKAN	LOKASI BENCANA		KERUGIAN AKIBAT BENCANA			JUMLAH KORBAN (JAWA)
						DESA / KEL.	KECAMATAN	RUSAK TOTAL	RUSAK BEKAT	RUSAK RINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					n Dapur						
	18	Kebakaran	27-Jul-22	1	1 Rumah	Besusu Tengah	Palu Timur	√			3
	19	Kebakaran	21-Ags-22	1	1 Rumah Bagian Dapur	Siranindi	Palu Barat			√	4
	20	Kebakaran	09-Sep-22	1	1 Unit Warung + Tempat Tinggal	Besusu Tengah	Palu Timur		√		5
	21	Kebakaran	10-Sep-22	3	3 Unit Kost	Tatura Selatan	Palu Selatan		√		9
	22	Kebakaran	19-Sep-22	1	1 Unit Kios + Tempat Tinggal	Silae	Ulujadi	√			2
	23	Kebakaran	25-Sep-22	3	1 Rumah	Tatura Selatan	Palu Selatan	√			13
	24	Kebakaran	26-Sep-22	1	1 Rumah	Lolu Selatan	Palu Timur	√			6
	25	Kebakaran	09-Okt-22	1	1 Rumah	Besusu Barat	Palu Timur	√			5
	26	Kebakaran	09-Nov-22	2	1 Rumah	Mamboro Induk	Palu Utara	√			7
	27	Kebakaran	03-Des-22	3	1 Rumah	Lolu Selatan	Palu Timur	√			9
	28	Kebakaran	05-Des-22	2	1 Rumah	Poboya	Mantik ulore		√		6

KABUPATEN / KOTA	NO	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH KORBAN (KK)	JENIS KERUSAKAN	LOKASI BENCANA		KERUGIAN AKIBAT BENCANA			JUMLAH KORBAN (JAWA)
						DESA / KEL.	KECAMATAN	RUSAK TOTAL	RUSAK BEBAST	RUSAK RINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	29	Kebakaran	12-Des-22	4	1 Rumah	Balaroa	Palu Barat	√			10
	30	Kebakaran	20-Des-22	3	2 Rumah	Pengawu	Tatang a	√			7
	31	Kebakaran	21-Des-22	1	1 Rumah	Tatura Selatan	Palu Selatan		√		5
	32	Kebakaran	22-Des-22	2	1 Rumah	Besusu Tengah	Palu Timur		√		5
TOTAL KORBAN BENCANA SOSIAL KOTA PALU				63							224
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	1	Kebakaran Rumah	05-Jan-22	1	Rumah	Desa Baka	Tinangkung	√			4
	2	Orang Hilang	22-Mei-22	1	Orang Hilang	Desa Tomboniki	Liang				1
	3	Kebakaran Rumah	19-Mei-22	1	Rumah	Desa Buko	Buko Selatan	√			2
	4	Kebakaran Rumah	05-Jun-22	1	Rumah	Desa Lalengan	Buko		√		3
	5	Kebakaran Rumah Nelayan	12-Jun-22	1	Rumah Nelayan	Desa Lalengan	Buko	√			3
	6	Kebakaran Rumah	02-Nov-22	1	Rumah	Desa Pelinglalo mo	Buko			√	6
	7	Kebakaran Rumah	10-Nov-22	1	Rumah	Desa Lelang Matamaling	Buko Selatan	√			4
TOTAL KORBAN BENCANA SOSIAL KAB. BANGKEP				7							23
KABUPATEN TOJO UNA-UNA	1	Kebakaran	16-Mar-22	1	Rumah	Toliba	Tojo Barat		√		3
	2	Kebakaran	08-Okt-22	1	Rumah	Pautu	Talatako		√		7

KABUPATEN / KOTA	NO	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH KORBAN (KK)	JENIS KERUSAKAN	LOKASI BENCANA		KERUGIAN AKIBAT BENCANA			JUMLAH KORBAN (JIWA)
						DESA / KEL.	KECAMATAN	RUSAK TOTAL	RUSAK BEKAT	RUSAK RINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Kebakaran	08-Okt-22	1	Rumah	Pautu	Talatako		√		3
	4	Kebakaran	08-Okt-22	1	Rumah	Pautu	Talatako			√	1
	5	Kebakaran	20-Mei-22	1	Rumah	Urundaka	Ampa na Tete		√		1
TOTAL KORBAN BENCANA SOSIAL KAB. TOUNA				5							15
KABUPATEN SIGI	1	Kebakaran	05-Feb-22	1	1 Rumah	Bakubakulu	Palolo		√		3
	2	Kebakaran	17-Feb-22	1	1 Rumah	Sidera	Sigi Kota		√		5
	3	Kebakaran	19-Feb-22	1	Sebagian Bangunan Rumah + Perabotan	Soulove Patua	Dolo			√	4
	4	Kebakaran	16-Mar-22	1	1 Rumah	Tongoa	Palolo			√	3
	5	Kebakaran	02-Apr-22	1	1 Rumah	Kalora	Kinovaro		√		4
	6	Kebakaran	05-Apr-22	1	1 Rumah	Kantewu II	Pipikoro			√	3
	7	Kebakaran	11-Apr-22	1	1 Rumah	Watunonju	Sigi Kota			√	5
	8	Kebakaran	14-Mei-22	1	1 Rumah	Maku	Dolo		√		1
	9	Kebakaran	19-Jun-22	1	1 Rumah	Gimpu	Kulawi Selatan		√		4
	10	Kebakaran	25-Jun-22	1	1 Rumah	Tongoa	Palolo		√		3

KABUPATEN / KOTA	NO	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH KORBAN (KK)	JENIS KERUSAKAN	LOKASI BENCANA		KERUGIAN AKIBAT BENCANA			JUMLAH KORBAN (JIWA)
						DESA / KEL.	KECAMATAN	RUSAK TOTAL	RUSAK BEBAST	RUSAK RINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	Kebakaran	29-Jul-22	1	1 Rumah	Balane	Kinovaro		√		4
	12	Kebakaran	14-Ags-22	3	2 Rumah + Bagian Dapur 1 Rumah Warga	Salua	Kulawi		√	√	
	13	Kebakaran		1	1 Rumah Bagian Dapur	Sidera	Sigi Kota			√	
	14	Kebakaran		1	1 Unit Rumah + Warung	Sigimpu	Sigi Kota		√		
TOTAL KORBAN BENCANA SOSIAL KAB. SIGI				16							39
KABUPATEN TOLI-TOLI	1	Kebakaran	04-Jan-22	1	Rumah	Desa Tindang	Lampasio				1
	2	Kebakaran	01-Apr-22	1	Rumah	Nalu	Baolan				1
	3	Kebakaran	08-Apr-22	1	Rumah	Desa Dadakitan	Baolan				1
	4	Kebakaran	16-Apr-22	1	Rumah	Desa Ogomoli	Galang				7
	5	Kebakaran	26-Apr-22	1	Rumah	Desa Kalangkangan	Galang				1
	6	Kebakaran	20-Mei-22	1	Rumah	Desa Ogotua	Dampal Utara				2
	7	Kebakaran	10-Jun-22	1	Rumah	Desa Tinading	Lampasio				1

KABUPATEN / KOTA	NO	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH KORBAN (KK)	JENIS KERUSAKAN	LOKASI BENCANA		KERUGIAN AKIBAT BENCANA			JUMLAH KORBAN (JAWA)
						DESA / KEL.	KECAMATAN	RUSAK TOTAL	RUSAK BEKAT	RUSAK RINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	Kebakaran	13-Jul-22	1	Rumahan	Kel. Panasakan	Baolan				1
	9	Kebakaran	13-Jul-22	1	Rumahan	Kel. Tambun	Baolan				1
	10	Kebakaran	13-Jul-22	1	Rumahan	Kel. Tambun	Baolan				1
	11	Kebakaran	13-Jul-22	1	Rumahan	Kel. Tambun	Baolan				1
	12	Kebakaran	13-Jul-22	1	Rumahan	Kel. Tambun	Baolan				1
	13	Kebakaran	13-Jul-22	1	Rumahan	Kel. Tambun	Baolan				1
	14	Kebakaran	22-Ags-22	1	Rumahan	Desa Ogolali	Dampal Utara				3
	15	Kebakaran	11-Sep-22	1	Rumahan	Desa Lakatan	Galang				1
	16	Kebakaran	29-Sep-22	1	Rumahan	Desa Kamalu	Ogodeide				2
	17	Kebakaran	21-Okt-22	1	Rumahan	Kel. Baru	Baolan				5
	18	Kebakaran	21-Okt-22	1	Rumahan	Kel. Baru	Baolan				4
	19	Kebakaran	21-Okt-22	1	Rumahan	Kel. Baru	Baolan				3
	20	Kebakaran	21-Okt-22	1	Rumahan	Kel. Baru	Baolan				5
	21	Kebakaran	11-Nov-22	1	Rumahan	Desa Kombo	Dampal Selatan				1
	22	Kebakaran	13-Nov-22	1	Rumahan	Desa Lelean Nono	Baolan				5
	23	Kebakaran	16-Des-22	1	Rumahan	Desa Kalangkan	Galang				1

KABUPATEN / KOTA	NO	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH KORBAN (KK)	JENIS KERUSAKAN	LOKASI BENCANA		KERUGIAN AKIBAT BENCANA			JUMLAH KORBAN (JIWA)
						DESA / KEL.	KECAMATAN	RUSAK TOTAL	RUSAK BEKAT	RUSAK RINGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	24	Kebakaran	21-Des-22	1	Rumah	Desa Tinabogan	Dondo				5
TOTAL KORBAN BENCANA SOSIAL KAB. TOLI-TOLI				24							55
TOTAL KORBAN BENCANA SOSIAL				115							356

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

Disamping permasalahan sosial yang harus ditangani dan dikurangi populasinya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah juga mempunyai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang harus ditingkatkan dan dikembangkan, meliputi:

a) Pekerja Sosial Masyarakat

Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial dengan kriteria sebagai berikut:

- WNI
- Laki-laki atau perempuan usia 18 tahun ke atas
- Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945
- Bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum
- Berkelakuan baik
- Sehat jasmani dan rohani
- Telah mengikuti pelatihan PSM
- Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM

Pekerja Sosial Masyarakat merupakan garda terdepan yang mendukung kontinuitas pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Hal tersebut disebabkan karena pekerja sosial masyarakat merupakan seseorang yang berdomisili pada suatu wilayah serta memegang peranan untuk menyampaikan informasi serta berbaur berusaha menyelesaikan permasalahan dan gejolak yang terjadi di lingkungannya atas pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Idealnya setiap desa memiliki seorang pekerja sosial masyarakat. Namun, kondisi di Sulawesi Tengah dengan jumlah kecamatan 171 dan jumlah desa 1049, pekerja sosial masyarakat yang ada sudah mencapai 4.408 orang namun penyebarannya tidak merata. Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk menggerakkan dan mendorong Dinas Sosial Kabupaten / Kota untuk mencari dan merekrut masyarakat yang berkompeten menjadi pekerja sosial masyarakat. Untuk mempertahankan kualitas dan kompetensi pekerja sosial masyarakat serta menjaga kontinuitas perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial melaksanakan bimbingan teknis bagi pekerja sosial masyarakat. Adapun data PSM pada tahun 2022 sejumlah 874 Orang. di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1.12
Data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PSM
1	2	4	5
1.	Banggai Kepulauan	53	160
2.	Banggai	34	113
3.	Morowali	3	3
4.	Poso	73	77
5.	Donggala	23	26
6.	Toli-Toli	65	98
7.	Buol	24	27
8.	Parigi Moutong	40	41

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PSM
1	2	4	5
9.	Tojo Una-Una	9	9
10.	Sigi	93	183
11.	Banggai Laut	-	77
12.	Morowali Utara	12	12
13.	Kota Palu	46	48
TOTAL		475	874

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

b) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan seseorang yang *dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial*. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah *mereka yang berlatarbelakang pendidikan pekerjaan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial yang memiliki pengalaman pelayanan sosial minimal 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti pelatihan di bidang kesejahteraan sosial*. Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKS adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut Dra. Umi Ratih Santoso dalam bukunya menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah *seseorang yang atas dasar sukarela mengabdikan dirinya di bidang usaha kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput*.

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa tenaga kesejahteraan sosial kecamatan adalah seorang yang memiliki kualitas pendidikan non pekerja sosial

yang memiliki pengalaman dalam bidang kesejahteraan sosial dan dididik serta dilatih dalam bidang kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK ini berada pada wilayah kecamatan. Pada saat ini, TKSK mempunyai tugas selain menyampaikan informasi pembangunan Kesejahteraan sosial, mendata dan memperbaharui secara periodik data penyandang masalah kesejahteraan sosial, bekerjasama dengan pemerintah terutama aparat pemerintah kecamatan dan desa mensukseskan pelaksanaan pembangunan seperti pendampingan pelaksanaan distribusi program beras miskin atau yang dikenal dengan Program Raskin. Jumlah TKSK di Sulawesi Tengah terus berkembang dari hanya 99 orang sampai dengan tahun 2013 menjadi 171 orang pada tahun 2014. Sehingga kondisi ideal satu kecamatan satu tenaga kesejahteraan sosial telah terpenuhi. Tahun 2015 sampai dengan 2016, jumlah TKSK belum mengalami peningkatan tetap 171 orang dan pada tahun 2017 telah mengalami kenaikan jumlah TKSK menjadi 176 orang, namun menyesuaikan dengan peningkatan tugas dan tanggung jawab TKSK perlu dipertimbangkan untuk penambahan kuantitas sehingga dapat lebih mengoptimalkan kinerja TKSK di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun data TKSK pada tahun 2022 di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1.13
Data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TKSK
1	2	3
1.	BANGGAI	23
2.	BANGGAI KEPULAUAN	12
3.	BANGGAI LAUT	7
4.	BUOL	11
5.	DONGGALA	16
6.	KOTA PALU	8
7.	MOROWALI	9
8.	MOROWALI UTARA	10

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TKSK
1	2	3
9.	PARIGI MOUTONG	23
10.	POSO	19
11.	SIGI	15
12.	TOJO UNA-UNA	12
13.	TOLI-TOLI	10
TOTAL		175

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

c) Taruna Siaga Bencana

Taruna Siaga Bencana atau yang dikenal dengan TAGANA pada hakekatnya merupakan berhimpunnya seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda. Kata-kata Taruna memiliki arti generasi muda, dan Kata Siaga memiliki arti segala upaya kesiapsiagaan dalam kondisi apapun dan Kata Bencana adalah tantangan dan masalah yang harus dihadapi dalam kiprah dan pengabdian pada kemanusiaan TAGANA juga tetap pada kaidah kaidah management bencana berbasis masyarakat. TAGANA bukan hanya berperan pada saat terjadi bencana tetapi juga pada saat pra bencana maupun pasca bencana. Jumlah personil TAGANA di Sulawesi Tengah semakin hari semakin berkembang seiring kebutuhan personil pada saat terjadi bencana. Pada saat ini jumlah personil TAGANA yang mendapatkan tali asih sebanyak 545 orang dan tersebar di seluruh kabupaten/ kota. Adapun data Tagana pada tahun 2022 di uraikan sebagai berikut:

Tabel 1.14

Data Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TAGANA
1	2	3
1.	KAB. BANGGAI	37
2.	KAB. POSO	18

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TAGANA
1	2	3
3.	KAB. DONGGALA	16
4.	KAB. TOLI TOLI	27
5.	KAB. BUOL	45
6.	KAB. MOROWALI	23
7.	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	28
8.	KAB. PARIGI MOUTONG	76
9.	KAB. TOJO UNA UNA	50
10.	KAB. SIGI	71
11.	KAB. BANGGAI LAUT	27
12.	KAB. MOROWALI UTARA	23
13.	KOTA PALU	104
TOTAL		545

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

d) Tenaga Pelopor Perdamaian

Khusus untuk penanganan bencana sosial Kementerian Sosial membentuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial baru yang di sebut dengan Tenaga Pelopor Perdamaian. Tenaga pelopor perdamaian merupakan suatu potensi sumber sosial yang berfungsi meredam gejala konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal yang rentan terjadi di tengah masyarakat, tugas mereka untuk mengatasi masalah sosial sebagai bantalan sosial untuk meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Adapun data Tenaga Pelopor Perdamaian pada tahun 2022 di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1.15
Data Tenaga Pelopor Perdamaian
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TENAGA PELOPOR
1	2	3
1.	KAB. BANGGAI	8
2.	KAB. POSO	13

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TENAGA PELOPOR
1	2	3
3.	KAB. DONGGALA	5
4.	KAB. TOLI TOLI	7
5.	KAB. BUOL	7
6.	KAB. MOROWALI	6
7.	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	6
8.	KAB. PARIGI MOUTONG	7
9.	KAB. TOJO UNA UNA	6
10.	KAB. SIGI	10
11.	KAB. BANGGAI LAUT	8
12.	KAB. MOROWALI UTARA	6
13.	KOTA PALU	18
14.	PROVINSI	36
TOTAL		143

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

e) Lembaga Kesejahteraan Sosial

Merupakan Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dengan kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas
- Mempunyai pengurus dan program kerja
- Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum
- Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesos

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial harus mempunyai sumberdaya berikut ini sebagai standar menuju akreditasi yaitu:

- SUMBER DAYA MANUSIA
- SARANA DAN PRASARANA

- SUMBER PENDANAAN, SERTA
- STANDAR LKS (YG SUDAH DITETAPKAN MELALUI PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011)

Sesuai dengan perkembangannya, jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial atau yang dikenal dengan LKS terus meningkat. Pada Tahun 2014, jumlah LKS di Sulawesi Tengah sebanyak 141 LKS tersebar di seluruh kabupaten dan kota dan jumlah LKS meningkat menjadi 145 pada tahun 2015, dan ditahun 2016 tidak terdapat peningkatan jumlah LKS. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan kembali dengan jumlah LKS menjadi 162, kemudian pada tahun 2018 tidak mengalami peningkatan jumlah LKS. Meskipun demikian, ada atau tidaknya perkembangan kuantitas tersebut belum diimbangi dengan perkembangan kualitas terutama pengelolaan manajemen LKS yang sampai dengan saat ini belum mempunyai Standar Operasional Prosedur atau SOP yang baku. Manajemen pengelolaan LKS baru sebatas manajemen turun temurun secara tradisional. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan sehingga pola pengelolaan manajemen LKS lebih tertib dan terarah dan dapat mencegah serta meminimalisir penyimpangan. Untuk lebih mendorong terwujudnya LKS professional perlu dibuat Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur yang menjabarkan *reward* bagi LKS berprestasi dan mampu mempertahankan mutu dan kualitasnya serta *punishment* bagi LKS yang tidak mampu membuka diri terhadap dinamika perubahan dan berkembang sehingga LKS mampu menjadi mitra pemerintah dalam mensukseskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah. Adapun data LKS pada tahun 2022 di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1.16

Data LKS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LKS	JUMLAH LKS TERAKREDITASI
1	2	3	4
1.	KAB. BANGGAI	21	13
2.	KAB. POSO	25	1

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LKS	JUMLAH LKS TERAKREDITASI
1	2	3	4
3.	KAB. DONGGALA	10	1
4.	KAB. TOLI TOLI	15	5
5.	KAB. BUOL	11	3
6.	KAB. MOROWALI	6	39
7.	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	3	4
8.	KAB. PARIGI MOUTONG	13	2
9.	KAB. TOJO UNA UNA	1	8
10.	KAB. SIGI	25	15
11.	KAB. BANGGAI LAUT	3	10
12.	KAB. MOROWALI UTARA	3	-
13.	KOTA PALU	72	4
TOTAL		208	105

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

f) Dunia Usaha

Dalam mensukseskan pembangunan khususnya bidang kesejahteraan sosial, maka pemerintah sangat mengharapkan partisipasi *stakeholders* termasuk diantaranya kalangan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* atau CSR. Implementasi CSR selama ini khususnya di Sulawesi Tengah memang masih berfokus pada urusan pendidikan dan kesehatan dan belum menyentuh pada urusan sosial terutama pengentasan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk menggerakkan Dunia usaha untuk lebih peduli terhadap permasalahan sosial maka Dinas Sosial melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku dunia usaha yang mempunyai program CSR. Disamping itu, Dinas Sosial juga menginisiasi pembentukan 1 forum CSR tingkat provinsi yang akan mendorong dan menggerakkan pelaku dunia usaha di Sulawesi Tengah untuk melaksanakan program CSR dengan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial.

g) Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab

sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Rumusan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
2. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna.
4. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karenanya setiap desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya sendiri.
5. Gerakannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial berarti bahwa semua upaya program dan kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya

Karang Taruna diharapkan menjadi embrio munculnya pekerja-pekerja sosial masyarakat yang berkompeten dan berkualitas secara aktif mendukung pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas karang taruna di Sulawesi Tengah khususnya, Dinas Sosial melaksanakan bimbingan teknis bagi pengurus Karang Taruna, pemberian bantuan stimulant pengembangan usaha

menuju kemandirian organisasi Karang Taruna dan Bulan Bhakti Karang Taruna sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan Karang Taruna se Sulawesi Tengah pada pembangunan kesejahteraan sosial serta menjadi ajang tukar pengalaman pengelolaan manajemen organisasi. Namun, kondisi tersebut belum didukung oleh alokasi anggaran yang memadai sehingga setiap tahunnya. Pada tahun 2010 telah dilakukan pembinaan bagi 36 Karang Taruna, dan tahun 2011 sampai dengan 2012 dilakukan bimbingan kepada 40 Karang Taruna, pada tahun 2013, yang menerima bimbingan dan pembinaan sebanyak 44 Karang Taruna. Namun, pada tahun anggaran 2014, pembinaan tersebut hanya mampu dialokasikan bagi 40 Karang Taruna, ditahun 2015 mengalami penurunan hanya mampu dialokasikan bagi 22 Karang Taruna, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali sebanyak 37 Karang Taruna dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 46 Karang Taruna yang menerima bimbingan dan pembinaan serta yang menerima bantuan sosial UEP sebanyak 6 Karang Taruna. Adapun Data Populasi jumlah Karang Taruna pada tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.17
Data Populasi Karang Taruna
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	KARANG TARUNA TERDATA	KARANG TARUNA TIDAK TERDATA	JUMLAH KARANG TARUNA
1	2	3	4	5
1	Kota Palu	41	0	41
2	Kab. Sigi	23	0	23
3	Kab. Donggala	73	1	74
4	Kab. Parigi Moutong	103	0	103
5	Kab. Toli toli	17	0	17
6	Kab. Buol	59	0	59
7	Kab. Poso	44	0	44
8	Kab. Tojo Una Una	25	0	25
9	Kab. Morowali	47	0	47
10	Kab. Moruwali Utara	5	7	12
11	Kab. Banggai	97	248	345
12	Kab. Banggai Laut	6	0	6

13	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-
JUMLAH		540	256	796

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

h) Wahana Kesejahteraan sosial Berbasis Masyarakat

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah suatu wahana/wadah/tempat masyarakat melaksanakan upaya atau usaha kesejahteraan sosial bagi warga masyarakatnya.

Pengelola WKSBM terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok sosial (Keperangkatan Pelayanan Sosial / KPS) dan tokoh-tokoh masyarakat.

Adapun tujuan dari WKSBM adalah agar masyarakat mampu mengentaskan sendiri warga masyarakatnya yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Sosialisasi/penjelasan WKSBM pada masyarakat (Ketua RT/RW/Kadus).
2. Pertemuan dengan perwakilan KPS dan tokoh-tokoh masyarakat.
3. Pembentukan pengelolaan / kepengurusan.
4. Identifikasi PMKS dan PSKS.
5. Sosialisasi WKSBM pada masyarakat (melalui pertemuan ditiap-tiap RT).
6. Penggalan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
7. Penyaluran dan memanfaatkan PSKS bagi PMKS.
8. Merujuk PMKS yang tidak mapu ditangani WKSBM ke Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS).

Jumlah masyarakat yang tergabung dalam WKSBM di Sulawesi Tengah yang telah dibina, dibimbing serta diberdayakan sebanyak 23 orang pada tahun 2017 sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Begitu pula pada tahun 2018, jumlah masyarakat yang tergabung dalam WKSBM ialah sebanyak 23 orang.

1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana pada tahun 2022 Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk yang ada pada 3 UPT yaitu Panti

Sosial Anak, Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Panti Sosial Tresna Werdha Tentena Poso dengan total sebanyak 180 personil yang terdiri dari Unit Dinas Sosial 117 Orang, UPT Panti Sosial Anak 19 Orang, UPT Panti Sosial Tresna Werda Madago Tentena Poso 19 Orang dan Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial 25 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Kualifikasi Tingkat Pendidikan :

1) Dinas

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Sekolah Dasar	-
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	-
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	39
4.	Sarjana Muda / D3	2
5.	Strata Satu	49
6.	Pasca Sarjana Magister (S2)	16
7.	Pasca Sarjana Doktor (S3)	2

2) UPT. Panti Sosial Anak

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Sekolah Dasar	-
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	-
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	4

4.	Sarjana Muda / D3	1
5.	Strata Satu	9
6.	Pasca Sarjana Magister (S2)	2

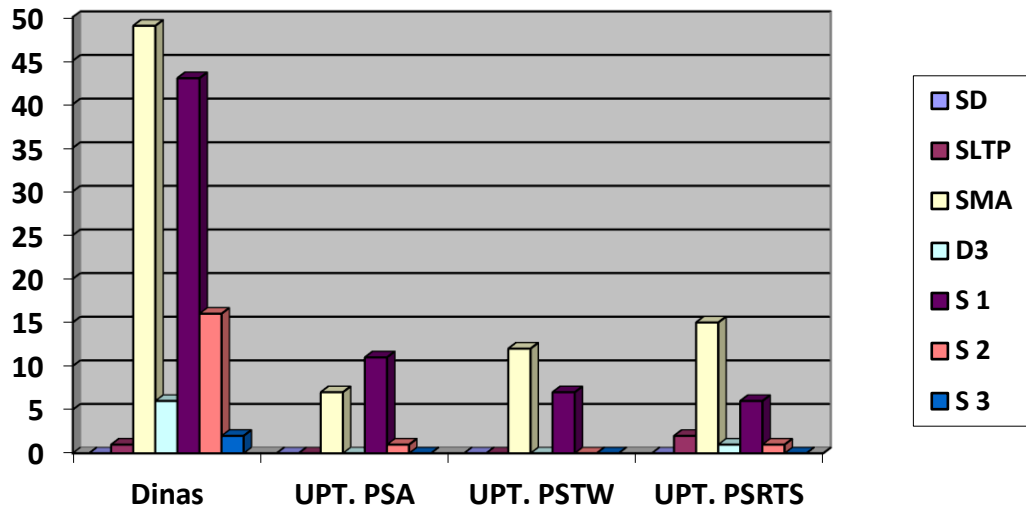
3) UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Sekolah Dasar	-
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	-
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	12
4.	Sarjana Muda / D3	-
5.	Strata Satu	6
6.	Pasca Sarjana Magister (S2)	-

4) UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Sekolah Dasar	-
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	-
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	9
4.	Sarjana Muda / D3	-
5.	Strata Satu	5
6.	Pasca Sarjana Magister (S2)	1

Sumber : Data Tahun 2022



b. Kualifikasi Golongan/ Kepangkatan :

1) Dinas

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan I	1
2.	Golongan II	34
3.	Golongan III	60
4.	Golongan IV	17

2) UPT. Panti Sosial Anak

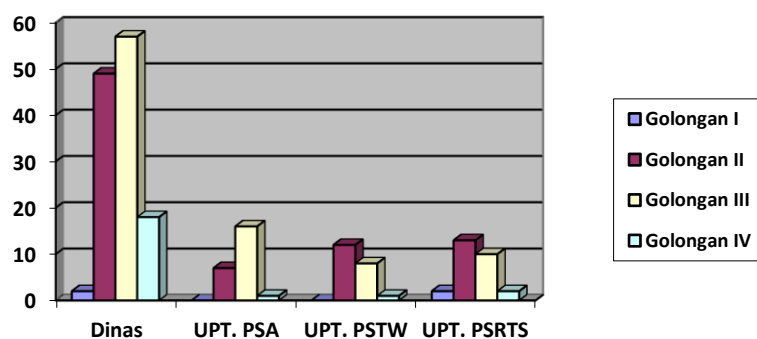
No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan I	0
2.	Golongan II	2
3.	Golongan III	13
4.	Golongan IV	1

3) UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan I	0
2.	Golongan II	10
3.	Golongan III	7
4.	Golongan IV	1

4) UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	7
3.	Golongan III	7
4.	Golongan IV	1



- Asset/Modal

Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikuasai oleh Dinas Sosial Berupa :

NO.	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1.	Asset Tetap Tanah	18	
2.	Asset Lainnya Alat – alat Angkutan - Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) - sepeda motor	3 6	
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur - Tripot - Global Positioning System (GPS)	1 1	
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mesin Ketik Manual Portable (11-13) - Mesin Absen (Time Recorder) - Lemari Besi - Brand Kas - Lemari Makan - Meja Kayu / Rotan - Kursi Besi / Metal - Meja Rapat - Meja Makan - Sofa - Lemari Pakaian - Kursi Kerja - Gordyn - Karpas - Mesin Cuci - Alat Pembersih Lain-lain - Lemari Es - AC Unit - AC Split - Kipas angin - Kompor Gas - Tabung Gas - Televisi - Equalizer - Loudspeaker	5 4 4 3 1 45 120 8 1 4 1 83 1 1 1 2 1 4 21 2 1 1 7 1 10	

	- Wireless	3	
	- Camera Film	1	
	- Tangga Alumunium	1	
	- Kaca Hias	2	
	- Mimbar / podium	1	
	- Handy Cam	1	
	- P.C Unit/Komputer PC	3	
	- Laptop	20	
	- Note Book	14	
	- Hard Disk	2	
	- Printer	9	
	- Scanner	1	
	- Monitor	2	
	- Power Supply	2	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	
	- Meja Kerja	80	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8	
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	
	- Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	8	
5.	Alat Studio dan Komunikasi		
	- Proyektor + Attachment	3	
	- Microphone / Wireless Mic	2	
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	3	
	- Power Amlifier	3	
	- MP4 Video – Audio Player	1	
	- Camera Electronic	2	
	- Amplifier	1	
	- Telephone (PABX)	1	
	- Pesawat Telephone	1	
6.	Alat Laboratorium		
	- Mixer	1	
	- Digital	2	
	- TV Monitor	2	
	- Rack, Diluter / Pipet	1	
	- Organ / Electone	1	
7,	Alat-alat Keamanan		
	CCTV	13	

	UPT. PSA		
1.	Alat-alat angkutan		
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	1	
	- Sepeda Motor	1	
2.	Alat Bengket dan Alat Ukur		
	- Air Conditioning Unit	30	
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Lemari Makan	1	
	- Lemari Kayu	1	
	- Ganset	1	
	- Tempat Tidur Kayu	1	
	- Meja Makan	1	
	- Kursi Tamu	4	
	- Kursi Tangan	60	
	- Kursi Lipat	85	
	- Kasur	70	
	- Bantal	2	
	- Guling	2	
	- Sofa	1	
	- Lemari Pakaian	2	
	- Lemari Rias	1	
	- Tempat Tidur Busa (Springbad)	3	
	- Kursi Kerja	1	
	- Karpas	4	
	- Kursi Teras	1	
	- Mesin Potong Rumput	4	
	- Mesin Cuci	2	
	- Lemari Es	1	
	- AC Split	2	
	- Kompor gas	2	
	- Alat Dapur Lain-lain	6	
	- Dispenser	3	
	- Rice Cooker	1	
	- Camera Video	2	
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	7	
	- P.C Unit/Komputer PC	1	
	- Laptop	1	
	- Printer	3	
	- Meja Kerja	1	
4.	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	- Proyektor + Attachment	1	

	- Microphone / Wireless Mic	1	
	- Power Amplifier	2	
	- Digital Audio Tape Recorder	2	
	- Peralatan Studio Visual Lain-lain	4	
	- Stand Microphone	1	
	- Lensa Kamera	1	
	- Printer	1	
	- Loudspeaker	1	
	- Sound system	1	
5.	Alat Laboratirium		
	- Tv Monitor	17	
	- Organ / Electone	1	
	UPT. PSTW TENTENA		
1.	Alat-alat Angkutan		
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	1	
	- Sepeda Motor	1	
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Lemari Makan	2	
	- Kursi Tamu	10	
	- Kasur	34	
	- Lemari pakaian	30	
	- Gordyn	1	
	- Mesin Cuci	2	
	- Lemari Es	1	
	- Televisi	10	
	- Sound system	1	
	- P.C Unit / Komputer PC	1	
	- Laptop	1	
	- Printer	1	
3.	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	- Facsimile	1	
	Alat-alat Kedokteran		
	- Tensi Meter		

1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Sehubungan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang sistem Akuntabilitas Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yaitu dalam pelaksanaan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen akuntabilitas kinerja nilai total capaian sebesar 73,11 sehingga akuntabilitas kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB masuk dalam kategori BB. Hal ini menunjukkan komponen AKIP yang ada, Baik yaitu akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sasaran yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Laporan kinerja harus menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Evaluasi program harus memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dilaksanakan.
3. Evaluasi rencana aksi harus menunjukkan perbaikan setiap periode dalam langkah – langkah nyata.

Rekomendasi dari hasil review tahun ini dan tahun – tahun sebelumnya harus segera ditindak lanjuti untuk menjadi bahan acuan perbaikan selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan Daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan Otonomi Daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa Daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan Daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD).

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra OPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Secara Operasional berdasarkan RENSTRA 2021 - 2026 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, maka tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah jangka menengah pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi tengah periode tahun 2021 - 2026 adalah :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran :

1. Meningkatnya fasilitasi bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial.
3. Terwujudnya perlindungan sosial korban bencana.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah :

1. Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan.
2. Persentase PMKS yang tertangani.
3. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial.
5. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

6. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial.
7. Persentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana.

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a). Strategi

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta berbagai faktor ketidakpastian yang akan dihadapi dimasa datang dan ketergantungan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian misi pembangunan, maka ditempuh strategi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Sosial Fakir Miskin
2. Mewujudkan pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan sosial
3. Melaksanakan rehabilitasi sosial kepada masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
4. Mewujudkan Penanganan korban bencana bencana alam dan sosial secara terpadu

b). Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah membangun ketahanan sosial berbasiskan masyarakat, meliputi :

1. Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga.
2. Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
3. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
4. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar.

5. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan dan PMKS lainnya.
6. Penyediaan Logistik dan Penampungan pengungsi.

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Tabel. 2.1
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait langsung Pencapaian
Sasaran Tahun 2022

NO	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3		4	5	6
		UNIT DINAS				
1	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		842.500.000	1.011.180.500	(168.680.500)
			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	40.000.000	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	40.000.000	40.000.000	-
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	802.500.000	971.180.500	(168.680.500)
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	31.000.000	31.000.000	-
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	57.500.000	57.500.000	-
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	50.000.000	16.726.000	33.274.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	664.000.000	865.954.500	(201.954.500)
2	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		10.000.000	10.000.000	-
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10.000.000	10.000.000	-
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	10.000.000	10.000.000	-

NO	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.482.008.825	2.566.636.525	(84.627.700)
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	235.000.000	290.573.000	(55.573.000)
		Penyediaan Permakanan	50.000.000	59.423.000	(9.423.000)
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	185.000.000	231.150.000	(46.150.000)
		Penyediaan Alat Bantu			-
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	50.000.000	69.632.000	(19.632.000)
		Penyediaan Makanan	50.000.000	69.632.000	(19.632.000)
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.019.009.000	2.019.008.700	300
		Penyediaan Makanan	50.000.000	50.000.000	-
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.969.009.000	1.969.008.700	300
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	42.952.000	42.952.000	-
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	42.952.000	42.952.000	-
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	135.047.825	144.470.825	(9.423.000)
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	135.047.825	144.470.825	(9.423.000)
4	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.716.944.950	34.750.761.975	(21.033.817.025)
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	77.400.000	77.400.000	-
		Pengangkatan Anak antar WNI	77.400.000	77.400.000	-
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	13.639.544.950	34.673.361.975	(21.033.817.025)
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	140.000.000	158.846.000	(18.846.000)
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	297.911.450	644.931.600	(347.020.150)
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	13.201.633.500	33.869.584.375	(20.667.950.875)
5	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	355.317.000	643.014.000	(287.697.000)
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	355.317.000	643.014.000	(287.697.000)
		Penyediaan Permakanan	255.317.000	543.014.000	(287.697.000)
		Pelayanan Dukungan Psikososial	100.000.000	100.000.000	-
6	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	179.999.548	385.400.342	(205.400.794)
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	179.999.548	385.400.342	(205.400.794)

NO	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3			4	5	6
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-	-
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	179.999.548	385.400.342	(205.400.794)
		Jumlah			36.916.810.761	59.319.193.603	(22.402.382.842)
		UPT PSA					
1	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			360.494.440	905.234.430	(544.739.990)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	360.494.440	905.234.430	(544.739.990)
				Penyediaan Makanan	84.905.000	116.405.000	(31.500.000)
				Penyediaan Sandang	17.150.000	43.450.000	(26.300.000)
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	12.561.050	15.412.400	(2.851.350)
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	87.040.990	146.825.705	(59.784.715)
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	153.737.400	564.021.325	(410.283.925)
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.000.000	1.000.000	-
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.850.000	1.850.000	-
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.250.000	16.270.000	(14.020.000)
							-
		Jumlah			360.494.440	905.234.430	(544.739.990)
		UPT PSRTS					
1	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			274.896.545	355.958.938	- 81.062.393
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	274.896.545	355.958.938	(81.062.393)
				Penyediaan Permakanan	35.540.000	33.275.000	2.265.000
				Penyediaan Sandang	19.250.000	19.250.000	-
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	12.981.285	12.981.285	-
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50.505.000	165.016.418	(114.511.418)
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	140.750.410	109.566.385	31.184.025
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.999.750	10.999.750	-
				Pemulangan ke Daerah Asal	4.870.100	4.870.100	-
							-
		JUMLAH			274.896.545	355.958.938	(81.062.393)
		UPT PSTW Tentena Madago					
1	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.075.002.892	1.050.375.337	24.627.555
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.075.002.892	1.050.375.337	24.627.555
				Penyediaan Permakanan	911.800.000	882.600.000	29.200.000

NO	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3		4	5	6
			Penyediaan Sandang	49.961.250	64.713.940	(14.752.690)
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	57.460.142	56.776.622	683.520
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	13.911.500	7.264.775	6.646.725
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.750.000	2.750.000	-
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	9.560.000	3.750.000	5.810.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.560.000	9.120.000	440.000
			Pemulasaraan	20.000.000	23.400.000	(3.400.000)
		JUMLAH		1.075.002.892	1.050.375.337	24.627.555
		JUMLAH TOTAL DINAS		17.586.770.323	39.366.993.342	(21.780.223.019)
		JUMLAH TOTAL DINAS + UPTD		19.297.164.200	41.678.562.047	(22.381.397.847)

Tabel. 2.2
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2022

NO	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3		4	5	6
		UNIT DINAS				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		19.330.040.438	19.952.200.261	(622.159.823)
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.237.825	146.037.825	200.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.650.000	15.650.000	-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.700.000	20.700.000	-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.887.825	109.687.825	200.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.261.291.846	17.435.870.151	(174.578.305)
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.899.593.846	16.888.735.651	10.858.195
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	361.698.000	547.134.500	(185.436.500)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		65.326.425	126.118.275	(60.791.850)
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65.326.425	126.118.275	(60.791.850)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		206.626.375	223.025.375	(16.399.000)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.460.525	6.460.525	-
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.165.850	206.564.850	(16.399.000)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		250.900.150	375.345.150	(124.445.000)

NO	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3		4	5	6
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
			Pegadaan Mebel	-	-	-
			Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.900.150	225.345.150	(124.445.000)
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.115.282.817	1.097.428.485	17.854.332
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	8.000.000	(3.000.000)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338.036.242	300.833.410	37.202.832
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.850.000	55.850.000	-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	716.396.575	732.745.075	(16.348.500)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.375.000	548.375.000	(264.000.000)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.425.000	173.425.000	(14.000.000)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.950.000	99.950.000	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	275.000.000	(250.000.000)
Jumlah				19.330.040.438	19.952.200.261	(622.159.823)

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		FORMULA INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	METODOLOGI
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	$\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 100 \right)$	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data dalam 1 tahun dibagi jumlah Kabupaten/Kota di kali 100	Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran data
		2	Persentase PMKS yang tertangani	$\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 100 \right)$	Jumlah realisasi PMKS yang tertangani dalam 1 tahun dibagi jumlah populasi PMKS di kali 100	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 yang mendapatkan pelayanan sosial
		3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 100 \right)$	Jumlah realisasi PMKS yang menerima bantuan sosial untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam 1 tahun dibagi jumlah populasi PMKS di kali 100	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 yang mendapatkan bantuan sosial
		4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	$\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 100 \right)$	Jumlah realisasi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima rehabilitasi sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah populasi di kali 100	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan dan mendapatkan layanan sosial sehingga kembali fungsi sosialnya
2	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok	$\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 100 \right)$	Jumlah realisasi panti sosial yang menerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif dalam 1 tahun dibagi jumlah populasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi yang menerima bantuan Usaha Ekonomi untuk mendukung operasional panti

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	METODOLOGI
1	2	3	4	5	6
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	6 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial 7 Persentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana	$\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 100 \right)$ $\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Populasi}} \times 100 \right)$	panti sosial di kali 100 Jumlah realisasi panti yang mempunyai layanan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah populasi panti di kali 100 Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar dalam 1 tahun dibagi jumlah populasi di kali 100	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi yang menerima bantuan lainnya seperti sarana untuk pengasuhan atau pelayanan sosial Korban bencana yang mendapatkan bantuan logistik dan layanan dukungan psikososial

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 2 Persentase PMKS yang tertangani 3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	50% 0,90% 5,28%

2	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	0,82%
		5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	3,51%
		6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	76,02%
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	7	Persentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%

- **Sumber Dana APBD**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
A.	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	19.297.164.200	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	842.500.000	
2.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10.000.000	
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.482.008.825	
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.716.944.950	
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	355.317.000	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	179.999.548	
B.	UPT. PANTI SOSIAL ANAK	360.494.440	
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	360.494.440	
C.	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL	274.896.545	
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	274.896.545	
D.	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA "MADAGO" TENTENA	1.075.002.892	
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.075.002.892	
	TOTAL PAGU	19.297.164.200	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang berisi informasi mengenai capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022. Tahun 2022 ini juga merupakan tahun transisi dimana sebagai pijakan kuat menuju keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah menjelang tahun terakhir periode 2021-2026.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Salah satu cara untuk melihat capaian kinerja organisasi adalah melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur Sulawesi Tengah dengan realisasi kinerja yang telah dicapai organisasi serta dilakukan analisis terhadap penyebab lambatnya dan atau tidak tercapainya target. Pengukuran ini dilaksanakan secara periodik setiap triwulan agar dapat ditemukan solusi dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja sebagaimana terlampir.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama yaitu menurunkan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatkan serta mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui sumber dana yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 2 Persentase PMKS yang tertangani 3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 4 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	50 0,90 5,28 0,82	100 9,76 9,68 0,63	200 1084,44 183,33 76,82
2	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	5 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 6 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	3,51 76,02	2,56 75	72,93 98,65
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	7 Persentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2022(diolah kembali)

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
----	-----------------	--------------------------------------

1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dari sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	Diatas 91%	5	Sangat Baik
2	76% sampai dengan 90%	1	Tinggi
3	66% sampai dengan 75%	1	Sedang
4	51% sampai dengan 65%	-	Rendah
5	Dibawah 50%	-	Sangat Rendah
	JUMLAH		

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	91<	76<90	66<75	51≤65	≤50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	50	100	200	v				
		2 Persentase PMKS yang tertangani	0,90	9,76	1084,44	v				
		3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	5,28	9,68	183,33	v				
		4 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	0,82	0,63	76,82		v			
2	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	5 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	3,51	2,56	72,93			v		
		6 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	76,02	75	98,65	v				
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	7 Persentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	v				

Sumber : Dinas Sosial Prov. Sulteng 2022 (diolah kembali).

Data capaian di atas menggambarkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang ada terdapat 5 (lima) indikator capaian diatas 91%, kemudian 1 (satu) indikator capaian diantara 76% sampai dengan 90% atau kategori tinggi, dan 1 (satu) indikator capaian diantara 66% sampai dengan 75% atau kategori sedang. Dengan demikian indikator capaian anggaran tahun 2022 mengalami pencapaian indikator kinerja sasaran yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase indikator kinerja sasaran di atas 91% lebih banyak dibandingkan indikator yang berada dibawah 91%.

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja

dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran kesatu yaitu Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 s/d 2026 dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	42,86	100	233
2	2022	50	100	200

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2022.

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi di 13 (tigabelas) kabupaten/kota sesuai dengan target sasaran kinerja , dan terlaksana secara keseluruhan sehingga capaian kinerja menjadi 200%.

2. Persentase PMKS yang tertangani, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 s/d 2026 dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	4,72	0,24	5,08
2	2022	0,90	9,76	1083,33

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2022.

Pada tahun 2022, di APBDP di triwulan III Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada program perlindungan dan jaminan sosial sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melaksanakan Program BANTU pada Tahap Ke - 2 mendapatkan alokasi anggaran yang menambah jumlah penerima manfaat bertambah sebesar 19.924 KK sehingga capaian kinerja menjadi 1083,33%.

3. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 s/d 2026 dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	5,97	0,35	5,86
2	2022	5,28	9,68	183

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2022.

Pada APBDP di triwulan ke III, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran pada Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti sehingga menambah jumlah target sasaran kinerja , dan terlaksana secara keseluruhan sehingga capaian kinerja menjadi 183%.

4. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 s/d 2026 dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	-------	--------	-----------	-------------

1	2021	100	0,23	0,23
2	2022	0,82	0,63	76,82

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2022.

2. Sasaran kedua meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial

Sasaran kedua yaitu meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 s/d 2026 dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	2,34	-	-
2	2022	3,51	2,56	72,93

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2022.

2. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 s/d 2026 dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	69,59	61,4	88
2	2022	76,02	75	98,65

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2022.

3. Sasaran ketiga Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana

Sasaran ketiga yaitu Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana dengan indikator kinerja yaitu :

- 1 Persentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 s/d 2026 dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	100	100	100
2	2022	100	100	100

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2022.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RPJMD 2021-2026.

Realisasi capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Target RENSTRA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4						5						6					
1	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penanganan Masalah Kesejahteraan	1 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan	42,86	50	50	57,14	64,29	71,43	100	100					2,33	2				

N O	SASAR AN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
			20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26
1	2	3	4						5						6					
	n Sosial (PMKS)	kemiskinan																		
		2 Persentase PMKS yang tertangani	4,72	0,9	2,08	2,6	1,86	2,18	0,24	9,76					0,05	10,84				
		3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	5,97	5,28	4,35	5,21	4,95	4,84	0,35	9,68					0,06	1,83				
		4 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	100	0,82	2	2,5	3	3,25	0,23	0,63					0,00	0,77				
2	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	5 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	2,34	3,51	4,09	4,68	5,26	5,85	-	2,56					-	0,73				
		6 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana	69,59	76,02	82,46	88,3	94,15	100	61,4	75					0,88	0,99				

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4						5						6					
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	7	na pelayanan sosial																	
			Persentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	100	100					1,00	1,00				

3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sangat baik karena dari 7 indikator kinerja sasaran yang ada terdapat 5 (lima) indikator capaian diatas 91%, kemudian 1 (satu) indikator capaian diantara 76% samapai dengan 90% atau kategori tinggi, dan 1 (satu) indikator capaian diantara 66% sampai dengan 75% atau kategori sedang. Dengan demikian indikator capaian tahun 2022 mengalami pencapaian indikator kinerja sasaran yang sangat baik. Salah satu penyebab keberhasilan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah Program BANTU (Bantuan Tunai) dimana program tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam intervensi kemiskinan serta dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah dalam percepatan penurunan kemiskinan.

3.1.5 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Pertama, Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** di dukung oleh program :

1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dimana pada tahun anggaran 2021 terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Sasaran pertama Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan program kegiatan yang ada dalam SPKD 2022 (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2022) yaitu :

Tabel. 3.13

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2		3		4
			UNIT DINAS		
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		1	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani
	-	Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	-	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	2		3			4	
				Kabupaten/Kota Asal			
	-	Rehabilitasi Anak Terlantar			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal
	-	Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Perdagangan rang	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar
2	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma					2.	Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
	-	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat		-	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
3	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial EKS Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Lainnya.				Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
	-	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Panti
4	Program Pembinaan Anak Terlantar (UPT PSA)			-	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
	-	Pembangunan Bakat dan Keterampilan Anak terlantar			Penyediaan Makanan		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
5	Program Pembinaan Tuna Sosial (UPT PSRTS)			-	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
	-	Pembangunan Bakat dan Keterampilan Tuna Sosial			Penyediaan Makanan		Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
6	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo (UPT PSTW Madago)				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	2		3			4	
							spiritual dan bantuan sosial di Dalam Panti
	-	Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Dalam Panti	-	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		1.	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial dalam panti
7		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				2.	Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti
	-	Pelatihan Bagi Keluarga Miskin Perdesaan			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
	-	Pelatihan Bagi Keluarga Miskin Perkotaan	-	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial
	-	Pelatihan Bagi Keluarga Miskin Pesisir dan Pulau-pulau			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial		Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial
			3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial
						2.	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan
			-	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku
					Pengangkatan Anak antar WNI		Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak
			-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2			3			4
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat
						Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan
				UPT PSA			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1. Persentase lanjut usia terlanter, penyandang Disabilitas dan anak terlanter yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
				-	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlanter di Dalam Panti		Jumlah Anak terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
						Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
						Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2		3			4
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti
			UPT PSRTS			
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
			-	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
					Penyediaan Permakanan	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
					Penyediaan Sandang	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
					Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti
					Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti
					Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti
					Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal
			UPT PSTW Tentena Madago			

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2		3			4
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1. Persentase lanjut usia terlanter, penyandang Disabilitas dan anak terlanter yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
			-	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanter di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia terlanter yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
					Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia terlanter yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlanter yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
					Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lanjut Usia terlanter yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti
					Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia terlanter yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlanter yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlanter yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti
					Pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti

- **Sasaran kedua, meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial** di dukung oleh program sebagai mana tabel dibawah ini :

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tabel. 3.14

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
		UNIT DINAS		
1	Program Pemberdayaan Sosial	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan
	- Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial			2. Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial
	- Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan serta Kesetiakawanan Sosial			3. Persentase SDM Kesos yang Profesional
	- Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan
2	Program Pembinaan Potensi Sumber Kesos			Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat
	- Pemberdayaan Pekerja Sosial masyarakat	-	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1. Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,
	- Pemberdayaan Organisasi Sosial			2. Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3			4
	- Pemberdayaan Karang Taruna			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya
	- Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
		2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
			- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas TMPN Provinsi
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP

- Sasaran ketiga, terwujudnya perlindungan sosial korban bencana di dukung oleh program penanganan bencana sebagai mana tabel dibawah ini:

Tabel. 3.15

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
		UNIT DINAS		
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial
	- Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyakut Cepat Ttanggap darurat			2. Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan
	- Perlindungan sosial korban bencana sosial		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamiaian yang Siap Ditugaskan
	- Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Keluarga			Penyediaan Permakanan
				Pelayanan Dukungan Psikososial
				Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi

3.2 EFESIENSI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut:

APBD : Pagu Anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 61.630.762.308,- (*enam puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah*), realisasinya Rp. 59.687.402.172,- (*lima puluh sembilan*

milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau 96,85 %. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.16

Realisasi Keuangan Dinas Sosial Tahun 2022 Sumber Dana APBD

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	UNIT DINAS						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1 . Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 . Nilai SAKIP 3 . Indeks Kepuasan Masyarakat	19.952.200.26 1	18.194.829.06 2	91,19%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.037.825	145.627.250	99,72%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	15.650.000	15.300.000	97,76%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	20.700.000	20.695.050	99,98%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	109.687.825	109.632.200	99,95%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	17.435.870.15 1	15.761.808.53 7	90,40%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	16.888.735.65 1	15.214.791.86 0	90,09%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Jumlah Laporan keuangan	547.134.500	547.016.677	99,98%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
			n/Semesteran SKPD					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	126.118.275	125.949.475	99,87%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	126.118.275	125.949.475	99,87%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	223.025.375	222.641.327	99,83%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket pengadaan	6.460.525	6.424.477	99,44%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket pengadaan	10.000.000	10.000.000	100,00 %	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	206.564.850	206.216.850	99,83%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	375.345.150	374.870.000	99,87%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan				
		Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	225.345.150	225.200.000	99,94%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya	150.000.000	149.670.000	99,78%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.097.428.485	1.028.543.485	93,72%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Administrasi	8.000.000	8.000.000	100,00 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2			3	4	5	6	7
				Persuratan yang dikelola				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.833.410	232.371.459	77,24%	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	55.850.000	55.775.000	99,87%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	732.745.075	732.397.026	99,95%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	548.375.000	535.388.988	97,63%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	173.425.000	161.279.988	93,00%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	99.950.000	99.499.000	99,55%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	275.000.000	274.610.000	99,86%	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1 . Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	1.011.180.500	993.316.213	98,23%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			2 . Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial					
			3 . Persentase SDM Kesos yang Profesional					

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	40.000.000	40.000.000	100,00 %	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	40.000.000	40.000.000	100,00 %	
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1 . Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,	971.180.500	953.316.213	98,16%	
			2 . Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos				
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	31.000.000	31.000.000	100,00 %	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	57.500.000	57.500.000	100,00 %	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya	16.726.000	16.726.000	100,00 %	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya	865.954.500	848.090.213	97,94%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Masyarakat Kewenangan	Kewenangan Provinsi				
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	10.000.000	5.645.000	56,45%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	10.000.000	5.645.000	56,45%	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	10.000.000	5.645.000	56,45%	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1 . Persentase lanjut usia terlanter, penyandang Disabilitas dan anak terlanter yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar 2 . Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	2.566.636.525	2.562.827.136	99,85%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlanter di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	290.573.000	288.762.311	99,38%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	59.423.000	59.261.160	99,73%	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Panti	231.150.000	229.501.151	99,29%	
			Pemberian Alat Bantu					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	69.632.000	69.154.360	99,31%	
			Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	69.632.000	69.154.360	99,31%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	2.019.008.700	2.018.136.400	99,96%	
			Penyediaan Makanan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	50.000.000	49.462.700	98,93%	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual dan bantuan sosial di Dalam Panti	1.969.008.700	1.968.673.700	99,98%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 . Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial dalam panti	42.952.000	42.839.360	99,74%	
			2 . Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	42.952.000	42.839.360	99,74%	
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	144.470.825	143.934.705	99,63%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	144.470.825	143.934.705	99,63%	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1 . Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.750.761.975	34.633.384.183	99,66%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			2 . Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan				
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	77.400.000	76.914.000	99,37%	
		Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	77.400.000	76.914.000	99,37%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	34.673.361.97 5	34.556.470.18 3	99,66%	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	158.846.000	158.054.010	99,50%	
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	644.931.600	644.048.863	99,86%	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	33.869.584.37 5	33.754.367.31 0	99,66%	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1 . 2 . Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan	643.014.000	616.529.645	95,88%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	643.014.000	616.529.645	95,88%	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	543.014.000	524.834.061	96,65%	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	100.000.000	91.695.584	91,70%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
				Kewenangan Provinsi				
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	385.400.342	381.658.642	99,03%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas TMPN Provinsi	385.400.342	381.658.642	99,03%	
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi				
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	385.400.342	381.658.642	99,03%	
	Jumlah				59.319.193.60 3	57.388.189.88 1		
	UPT PSA							
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1. Persentase lanjut usia terlanter, penyandang Disabilitas dan anak terlanter yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	905.234.430	904.952.265	99,97%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	905.234.430	904.952.265	99,97%	
			Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	116.405.000	116.355.000	99,96%	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	43.450.000	43.420.000	99,93%	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan kesehatan di Dalam Panti	15.412.400	15.371.350	99,73%	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti	146.825.705	146.761.278	99,96%	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti	564.021.325	563.964.637	99,99%	
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	1.000.000	1.000.000	100,00 %	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	1.850.000	1850000	100,00 %	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	16.270.000	16.230.000	99,75%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
	Jumlah UPT. PSA				905.234.430	904.952.265	98,23%	
	UPT PSRTS							
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	355.958.938	347.401.968	97,60%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	355.958.938	347.401.968	97,60%	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	33.275.000	30.469.430	91,57%	
			Penyediaan Sandang	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	19.250.000	19.250.000	100,00 %	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	12.981.285	12.981.285	100,00 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	165.016.418	161.646.118	97,96%	
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti	109.566.385	107.185.285	97,83%	
			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	10.999.750	10.999.750	100,00 %	
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal	4.870.100	4.870.100	100,00 %	
	JUMLAH UPT. PSRTS				355.958.938	347.401.968	89,34%	
	UPT PSTW Tentena Madago							
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1. Persentase lanjut usia terlanjar, penyandang Disabilitas dan anak terlanjar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.050.375.337	1.046.858.058	99,67%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.050.375.337	1.046.858.058	99,67%	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	882.600.000	879.280.000	99,62%	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	64.713.940	64.713.940	100,00 %	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	56.776.622	56.754.343	99,96%	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	7.264.775	7.264.775	100,00 %	
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	2.750.000	2.750.000	100,00 %	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	3.750.000	3.750.000	100,00 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	9.120.000	8.945.000	98,08%	
			Pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti	23.400.000	23.400.000	100,00 %	
	JUMLAH UPT. PSTW				1.050.375.337	1.046.858.058	99,67%	
	JUMLAH TOTAL DINAS				59.319.193.603	57.388.189.881	96,74 %	
	JUMLAH TOTAL DINAS + UPT.PSA + UPT.PSRTS + UPT.PSTW				61.630.762.308	59.687.402.172	96,85 %	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen LKjIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini merupakan pencerminan atas capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas serta kontribusi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sama sasaran kinerja. Meskipun terdapat beberapa faktor diluar kendali namun Dinas Sosial tetap memegang peranan terhadap capaian kinerja yang signifikan bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk sasaran strategis yang belum mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan harus dijadikan bahan kajian dan pemicu bagi perbaikan kinerja di tahun 2023.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan nilai capaian kinerja berskala sangat baik karena dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang ada terdapat 5 (lima) indikator capaian diatas 91%, kemudian 1 (satu) indikator capaian diantara 76% samapai dengan 90% atau kategori tinggi, dan 1 (satu) indikator capaian diantara 66% sampai dengan 75% atau kategori sedang. Dengan demikian indikator capaian anggaran tahun 2022 mengalami pencapaian indikator kinerja

sasaran yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase indikator kinerja sasaran di atas 91% lebih banyak dibandingkan indikator yang berada dibawah 91%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan beberapa strategi antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan melalui penetapan data populasi sasaran yang valid, intervensi program dan kegiatan yang tepat, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, Januari 2023
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199103 2 006